



Efektivitas Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

Mohammad Irfan^{1*}, Salahuddin²

¹⁻²Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Penulis korespondensi: fannur74@yahoo.co.id

Abstract. *The urban village (kelurahan) is the government unit that interacts directly with the community and holds a strategic position in promoting development and community empowerment. The village head (Lurah) plays an essential role in encouraging public participation, coordinating development programs, and fostering community development. This study aims to analyze the role of the Lurah of Dara Urban Village in community empowerment and to identify the factors that support and hinder the effectiveness of this role. The study employed a qualitative descriptive approach and was conducted in Dara Urban Village, Rasanae Barat District, Bima City. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed descriptively using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Lurah's role in community empowerment is carried out through three main functions: planning, implementation, and supervision. During the planning stage, the Lurah involved village officials, community members, and the Community Empowerment Institution (LPM) in formulating development agendas. During the implementation stage, the Lurah performed governmental, developmental, and community development functions through program coordination, participatory development, and support for community economic activities. During the supervision stage, the Lurah monitored government administration, physical development projects, and community economic development programs. The effectiveness of these roles was supported by internal coordination, community participation, the support of the LPM, and the Lurah's field leadership. However, it was constrained by limited personnel, inadequate infrastructure, the limited capacity of government staff, and the relatively low educational level of some community members. This study highlights that community empowerment at the urban village level requires strong leadership from the Lurah, accompanied by adequate institutional and social support.*

Keywords: *Community Empowerment; Community Participation; Lurah; Local Government; Urban Village.*

Abstrak. Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Lurah berperan penting sebagai penggerak partisipasi, koordinator pembangunan, dan pembina masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lurah Kelurahan Dara dalam pemberdayaan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, lurah melibatkan aparat kelurahan, masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penyusunan agenda pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, lurah menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi program, pembangunan partisipatif, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pada tahap pengawasan, lurah melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan, pembangunan fisik, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Efektivitas peran tersebut didukung oleh koordinasi internal, partisipasi masyarakat, dukungan LPM, dan kepemimpinan lapangan lurah, tetapi dihambat oleh keterbatasan personel, sarana-prasarana, kemampuan aparatur, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan memerlukan kepemimpinan lurah yang kuat sekaligus dukungan kelembagaan dan sosial yang memadai.

Kata Kunci: Kelurahan; Pemberdayaan Masyarakat; Pemerintah Daerah; Lurah; Partisipasi Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berada pada garis terdepan pelayanan publik dan berhadapan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada level ini, lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai pemimpin lokal yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan realitas sosial warga melalui koordinasi pembangunan, pembinaan sosial, penguatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pemberdayaan masyarakat menjadi orientasi penting pemerintahan lokal karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas warga, perluasan partisipasi, penguatan akses terhadap sumber daya, dan penciptaan kemandirian sosial ekonomi. Melihat kondisi tersebut, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tidak cukup diukur dari tertib administrasi semata, melainkan juga dari kemampuan lurah menggerakkan warga agar terlibat dalam proses pembangunan dan memperoleh manfaat nyata dari program yang dijalankan. Posisi strategis lurah ini membuat studi mengenai peran lurah tetap relevan dalam kajian administrasi negara, khususnya ketika isu pembangunan lokal, pemberdayaan, dan tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi semakin menonjol dalam diskursus pembangunan daerah (Gedeona, 2019; Qadar et al., 2021).

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa peran lurah telah dikaji dalam beragam konteks, tetapi dengan fokus dan penekanan yang berbeda-beda. Pelenkahu et al. (2017) menempatkan lurah sebagai aktor pemberdayaan masyarakat melalui dimensi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, serta menemukan bahwa pemberdayaan berjalan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Pratama dan Sujianto (2016) menekankan kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat, dengan temuan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan kedekatan lurah dengan warga. Tarigan dan Erman (2019) juga menunjukkan bahwa peran lurah berkaitan erat dengan pembinaan masyarakat, meskipun hasilnya belum optimal karena rendahnya partisipasi dan masih kuatnya hambatan sosial-ekonomi warga. Yuniar et al. (2024) memperluas fokus kajian dengan menempatkan lurah sebagai aktor pemberdayaan sumber daya manusia yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga, sedangkan Putri et al. (2025) menegaskan pentingnya kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai basis pemberdayaan. Peran lurah juga diteliti dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (Aryono, 2022), koordinasi administrasi (Faradilla, 2020), penguatan kinerja pegawai (Lampasa & Ahmad, 2024), optimalisasi kegiatan PKK

(Punusingon et al., 2018), dorongan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Qadar et al., 2021), hingga upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Rantepasang et al., 2017). Rangkaian studi tersebut memperlihatkan bahwa lurah bukan sekadar pejabat administratif, melainkan simpul penting pemerintahan lokal yang berperan dalam pembangunan, pelayanan, pengorganisasian warga, dan penguatan kapasitas masyarakat. Justru dari keragaman studi yang telah disampaikan sebelumnya tampak bahwa kajian tentang peran lurah masih tersebar pada berbagai arena substantif dan belum seluruhnya diarahkan untuk membaca peran lurah sebagai proses manajerial pemberdayaan masyarakat yang utuh.

Telaah atas penelitian terdahulu menunjukkan setidaknya tiga kesenjangan. Pertama, sebagian besar studi tentang peran lurah masih cenderung memotret satu arena substantif tertentu, misalnya program rumah tidak layak huni, kegiatan PKK, kepatuhan pajak, atau koordinasi administrasi, sehingga belum banyak penelitian yang secara eksplisit menelaah peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai proses manajerial yang utuh dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Padahal, dalam praktik pemerintahan kelurahan, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana lurah merencanakan agenda pembangunan, mengorganisasikan aparatur dan masyarakat, menggerakkan pelaksanaan, serta mengawasi keberlanjutan hasilnya. Kedua, banyak studi terdahulu berakhir pada kesimpulan normatif bahwa lurah “berperan” atau “cukup berperan”, tetapi belum cukup jauh mengaitkan temuan tersebut dengan kapasitas kelembagaan kelurahan dan kondisi sosial masyarakat sebagai faktor yang dapat memperkuat atau justru membatasi efektivitas peran lurah. Ketiga, secara metodologis, sebagian penelitian masih menempatkan data kuantitatif wilayah hanya sebagai latar belakang administratif, belum menjadikannya sebagai bukti fenomena untuk menunjukkan mengapa pemberdayaan masyarakat di suatu kelurahan menjadi isu yang mendesak untuk diteliti.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting ketika penelitian diarahkan pada Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Kelurahan Dara merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin lurah dan bertugas membantu camat dalam urusan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan wilayah kelurahan. Akan tetapi, data yang diperoleh dari kantor kelurahan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban sosial wilayah dan kapasitas kelembagaan kelurahan. Statistik kependudukan tahun 2026 menunjukkan bahwa Kelurahan Dara memiliki 8.011 jiwa penduduk, terdiri atas 4.024 laki-laki dan 3.983 perempuan. Pada saat yang sama, data

kepegawaian pada laman profil Kelurahan Dara hanya menampilkan 6 pegawai, dengan komposisi pendidikan 4 sarjana dan 1 SLTA.

Ketimpangan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dilihat dari kondisi sosial masyarakat. Dokumen penelitian sebelumnya mencatat terdapat 736 penduduk usia 7 - 45 tahun yang tidak pernah sekolah, sedangkan warga berpendidikan sarjana hanya 66 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara berhadapan dengan persoalan kapasitas sosial warga yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi, pemahaman terhadap program, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang pembangunan. Tantangan pemberdayaan di Kelurahan Dara tidak hanya terletak pada aspek birokrasi dan kelembagaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran sekaligus subjek pemberdayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, setidaknya terdapat dua persoalan utama. Pertama, Kelurahan Dara menghadapi beban pelayanan dan pembinaan masyarakat yang tinggi karena jumlah penduduknya besar, sementara kapasitas aparatur kelurahan relatif terbatas. Kedua, tantangan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersumber dari sisi birokrasi, tetapi juga dari kondisi sosial warga, terutama kualitas pendidikan yang belum merata. Artinya, ketika lurah dituntut menjadi koordinator pembangunan, penggerak partisipasi, dan fasilitator pemberdayaan, lurah bekerja dalam situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Pada titik inilah kesenjangan menjadi nyata, secara normatif lurah diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara efektif, tetapi secara empiris terdapat keterbatasan aparatur, sarana, dan kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menghambat efektivitas peran tersebut. Penelitian tentang peran lurah di Kelurahan Dara tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah lurah telah berperan, melainkan harus menjawab bagaimana peran itu dijalankan di tengah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sosial.

Kesenjangan ini penting untuk dijawab karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai bagaimana lurah mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan masyarakat, perbaikan tata kelola kelurahan berisiko hanya berfokus pada aspek administratif dan mengabaikan inti persoalan di lapangan. Jika penelitian hanya mengulang kesimpulan normatif bahwa lurah “cukup berperan”, maka dimensi strategis seperti kapasitas aparatur, dukungan sarana, kualitas koordinasi kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat akan tetap berada di pinggir analisis. Dampaknya, kebijakan perbaikan di tingkat kelurahan berpotensi tidak

menyentuh akar masalah. Bagi pemerintah daerah, kondisi ini dapat berdampak pada lemahnya kualitas pelayanan publik, tidak optimalnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya keberhasilan program pemberdayaan yang semestinya menjadi fondasi pembangunan berbasis warga. Bagi pengembangan ilmu administrasi negara, ketiadaan kajian yang menghubungkan peran lurah, fungsi manajemen, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat akan membuat pemahaman tentang pemerintahan kelurahan tetap parsial.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan jalan analitis dengan menempatkan teori manajemen George R. Terry sebagai grand theory untuk membaca peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat. Teori ini menekankan empat fungsi manajemen, *yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling*, yang dalam konteks penelitian diterjemahkan ke dalam kemampuan lurah menyusun perencanaan pembangunan, mengoordinasikan aparatur dan warga, menggerakkan pelaksanaan kegiatan, serta mengawasi keberlanjutan dan ketepatan program. Pemilihan teori manajemen menjadi penting karena peran lurah pada hakikatnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga manajerial: lurah harus mampu menerjemahkan mandat pemerintahan ke dalam proses kerja yang efektif. Sejumlah studi telah menunjukkan pentingnya dimensi kepemimpinan, koordinasi, dan partisipasi dalam peran lurah (Pratama & Sujianto, 2016; Putri et al., 2025; Lampasa & Ahmad, 2024), tetapi penelitian ini bergerak lebih jauh dengan memfokuskan analisis pada bagaimana fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dijalankan dalam praktik pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara, serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Solusi yang ditawarkan bukan sekadar menggambarkan aktivitas lurah, tetapi mengurai logika kerja pemerintahan kelurahan dan hambatan struktural yang mengitarinya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kajian administrasi publik lokal dengan menunjukkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat lebih tepat dibaca sebagai praktik manajerial pemerintahan lokal daripada sekadar pelaksanaan tugas formal. Penelitian ini juga memperkaya studi pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan kapasitas organisasi kelurahan dan kondisi sosial warga sebagai variabel kontekstual yang menentukan efektivitas peran lurah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bima dan Kelurahan Dara dalam memperbaiki desain pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas aparatur, pembenahan sarana administrasi, optimalisasi peran LPM/RT/RW, dan pengembangan strategi partisipasi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial

masyarakat setempat. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan fokus analisis pada fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas peran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran Lurah Kelurahan Dara dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima?; dan (2) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas aparatur, sarana-prasarana, koordinasi kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, khususnya ditinjau dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran tersebut. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji tidak cukup dijelaskan melalui angka, tetapi memerlukan pemahaman utuh terhadap tindakan, pengalaman, interaksi sosial, dan konteks kelembagaan pemerintahan kelurahan. Creswell dan Poth (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna dari masalah sosial, sedangkan Denzin dan Lincoln (2011) serta Moleong (2019) menekankan pentingnya memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Dara karena wilayah ini relevan dengan fokus studi, yakni peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di tengah keterbatasan kapasitas organisasi dan tantangan sosial warga. Data kelurahan menunjukkan adanya beban pelayanan dan pembinaan masyarakat yang cukup besar dengan dukungan aparatur yang terbatas, sehingga lokasi ini dinilai representatif untuk melihat praktik pemerintahan kelurahan secara nyata. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan melibatkan lurah, sekretaris dan staf kelurahan, pengurus LPM, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga yang mengetahui dan mengalami langsung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Patton, 2002; Bungin, 2010). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengalaman, persepsi, dan penilaian informan mengenai peran lurah, sedangkan data sekunder berasal dari

profil kelurahan, data kependudukan, pendidikan, struktur organisasi, dokumen pembangunan, dan arsip administrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang kaya sekaligus memungkinkan triangulasi (Merriam & Grenier, 2019; Yin, 2018). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang kuat (Denzin & Lincoln, 2011).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah, dikelompokkan, dan diinterpretasikan sesuai fokus penelitian, sementara data kuantitatif kelurahan digunakan sebagai konteks empiris untuk menjelaskan kondisi sosial dan kelembagaan tempat peran lurah dijalankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara dijalankan melalui tiga dimensi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga dimensi ini memperlihatkan bahwa lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai penggerak partisipasi, koordinator pembangunan, serta pengawas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini penting karena menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan pada dasarnya merupakan proses manajerial yang bergantung pada kemampuan lurah menghubungkan aparatur, lembaga lokal, dan warga dalam satu agenda pembangunan yang sama.

Secara kontekstual, peran tersebut berlangsung dalam kondisi sosial dan kelembagaan yang tidak sederhana. Statistik kependudukan tahun 2026 menunjukkan bahwa Kelurahan Dara memiliki 8.011 jiwa penduduk, terdiri atas 4.024 laki-laki dan 3.983 perempuan. Data pendidikan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masyarakat masih menjadi tantangan, karena terdapat 736 warga usia 7–45 tahun yang tidak pernah sekolah, sedangkan lulusan SD/ sederajat berjumlah 202 orang, SLTP/ sederajat 160 orang, SLTA/ sederajat 200 orang, dan sarjana hanya 66 orang. Dari sisi kelembagaan, kelurahan hanya didukung oleh 7 aparat, 3 RW, 10 RT, dan 7 anggota LPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat

berlangsung dalam konteks beban pelayanan yang tinggi, kapasitas aparatur yang terbatas, dan kualitas pendidikan masyarakat yang belum merata. Karena itu, pembacaan terhadap peran lurah tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural tempat peran tersebut dijalankan.

Pada dimensi perencanaan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa lurah menerapkan pola yang relatif partisipatif. Lurah tidak menyusun rencana pembangunan secara sepihak, melainkan berkoordinasi dengan sekretaris lurah, kepala seksi, dan staf untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Wawancara dengan aparat kelurahan menunjukkan bahwa setiap pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan, dibahas bersama seluruh staf sehingga suasana kerja dipersepsikan cukup demokratis. Dari sisi masyarakat, wawancara juga menunjukkan bahwa warga merasa dilibatkan dalam pembahasan rencana pembangunan kelurahan dan dimintai masukan terkait kebutuhan pembangunan ke depan. Pengurus LPM menyatakan bahwa pembicaraan mengenai rencana pembangunan tidak selalu dilakukan secara formal, tetapi juga melalui komunikasi informal antara lurah dan pengurus LPM.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lurah menjalankan fungsi perencanaan bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai proses membangun kesepahaman dengan aktor-aktor lokal. Dalam perspektif manajemen, pola ini mencerminkan fungsi planning yang tidak hanya berisi penyusunan kegiatan, tetapi juga proses penyerapan aspirasi, identifikasi kebutuhan, dan penyelarasan kepentingan organisasi dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Gedeona (2019) yang menempatkan lurah sebagai aktor strategis dalam pembangunan kelurahan melalui koordinasi dan percepatan pembangunan berbasis wilayah. Hasil ini juga mendukung temuan Putri et al. (2025) bahwa kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. Dalam konteks Kelurahan Dara, keterlibatan warga dan LPM pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa lurah telah menjalankan peran sebagai fasilitator partisipasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa partisipasi yang terbentuk masih cenderung berada pada tahap konsultatif. Masyarakat telah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi belum sepenuhnya terlihat sebagai pengambil keputusan bersama dalam perumusan prioritas pembangunan. Hal ini berarti bahwa perencanaan di Kelurahan Dara sudah bergerak ke arah partisipatif, tetapi intensitas pemberdayaannya masih belum sepenuhnya bersifat transformatif. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan pemberdayaan masyarakat tidak cukup diukur dari keterlibatan warga dalam forum, tetapi juga

dari seberapa jauh warga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan di Kelurahan Dara dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang sedang tumbuh, tetapi masih membutuhkan penguatan agar masyarakat tidak hanya hadir sebagai pemberi masukan, melainkan juga sebagai subjek yang ikut menentukan arah pembangunan.

Pada dimensi pelaksanaan, penelitian menunjukkan bahwa lurah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Dokumen penelitian memperlihatkan bahwa tugas lurah mencakup memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, membina kehidupan masyarakat, mengoordinasikan pembangunan partisipatif, dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana umum seperti jalan, jembatan, irigasi. Pelaksanaan peran ini tampak melalui koordinasi lurah dengan dinas, badan, dan bagian di tingkat pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan sarana kelurahan. Salah satu temuan yang menonjol adalah adanya kerusakan komputer di kantor kelurahan yang menghambat pekerjaan administrasi. Aparat kelurahan menjelaskan bahwa lurah telah berkirim surat kepada Bagian Umum Pemerintah Kota Bima untuk meminta penggantian komputer, tetapi sampai waktu penelitian sarana tersebut belum juga dipenuhi. Lurah sendiri menyatakan bahwa keterlambatan pemenuhan sarana dari pemerintah atasan berdampak langsung pada kelancaran administrasi kelurahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kapasitas administratif organisasi kelurahan. Dalam literatur administrasi publik, administrasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi merupakan fondasi dari pelayanan publik, dokumentasi pembangunan, dan koordinasi program. Karena itu, persoalan komputer yang rusak, keterbatasan jumlah komputer, dan minimnya fasilitas administrasi tidak dapat dianggap sepele. Hambatan administratif tersebut secara nyata membatasi efektivitas pelaksanaan program kelurahan. Dalam konteks ini, hasil penelitian sejalan dengan Faradilla (2020) yang menekankan pentingnya koordinasi administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Temuan ini juga memperluas studi-studi tentang peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek kepemimpinan dan partisipasi, dengan menunjukkan bahwa dimensi birokrasi dan infrastruktur administrasi juga sangat menentukan efektivitas pemberdayaan.

Pelaksanaan peran lurah di Kelurahan Dara tetap menunjukkan adanya fungsi *actuating* atau penggerakkan. Lurah tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga berupaya menggerakkan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa lurah memiliki tanggung jawab membina perekonomian masyarakat, mengoordinasikan pembangunan partisipatif, serta mendorong pemberdayaan melalui sarana-prasarana umum. Temuan penelitian sejalan dengan Pratama dan Sujianto (2016) serta Tarigan dan Erman (2019) yang menegaskan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat terletak pada kemampuannya menggerakkan masyarakat, memfasilitasi pembangunan, dan menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan warga. Penelitian ini menambahkan satu dimensi temuan penting bahwa penggerakkan tersebut ternyata berjalan di tengah keterbatasan kapasitas kelembagaan, sehingga efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan personal lurah dalam menjaga koordinasi dan mencari dukungan dari pemerintah di atasnya.

Pada dimensi pengawasan, lurah telah melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan, pembangunan fisik, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Dalam urusan pemerintahan, lurah menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pembinaan staf dan penertiban administrasi, khususnya terkait kearsipan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada urusan pemerintahan formal, pengurus LPM juga menilai bahwa pengawasan lurah terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan penetapan peraturan kelurahan telah berjalan sesuai tugas dan kewenangannya. Pada pembangunan fisik, warga menyatakan bahwa lurah cukup aktif turun ke lapangan dan bahkan pernah menegur pekerja proyek yang tidak bekerja sesuai bestek. Pada aspek ekonomi masyarakat, lurah juga dinilai aktif mengawasi industri rumahan dan memberikan masukan kepada pelaku usaha lokal.

Pengawasan lurah di Kelurahan Dara tidak semata-mata berorientasi pada kontrol birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pembinaan. Dalam perspektif manajemen, fungsi *controlling* pada kasus ini tidak hanya bermakna memeriksa kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, tetapi juga memastikan agar hasil pembangunan tetap berkualitas dan kegiatan ekonomi masyarakat memperoleh pendampingan. Hasil ini sejalan dengan Rachman (2019) yang menempatkan kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai proses yang tidak berhenti pada mobilisasi, tetapi juga mencakup pembinaan berkelanjutan. Qadar et al. (2021) menegaskan bahwa peran lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat membutuhkan pengawasan sekaligus motivasi agar masyarakat tetap terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks Kelurahan Dara, pengawasan yang dilakukan lurah memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal memulai program, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaannya.

Peran lurah di Kelurahan Dara secara substantif dapat dibaca sebagai praktik manajemen pemerintahan lokal. Perencanaan menunjukkan fungsi *planning*, pelaksanaan memperlihatkan fungsi *actuating* dan koordinasi, sedangkan pengawasan menunjukkan fungsi *controlling*. Temuan yang menarik adalah bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan dalam struktur birokrasi yang sepenuhnya ideal, melainkan dalam situasi organisasi yang serba terbatas. Karena itu, keberhasilan peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara tampak lebih sebagai hasil kombinasi antara kapasitas kepemimpinan personal, hubungan sosial dengan masyarakat, dan kemampuan adaptif menghadapi keterbatasan organisasi.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat yang bersifat organisasional maupun sosial. Faktor pendukung pertama adalah koordinasi internal aparatur. Lurah dinilai selalu melibatkan sekretaris lurah dan kepala seksi dalam perencanaan kegiatan, sehingga proses kerja menjadi lebih kolektif. Faktor kedua adalah partisipasi masyarakat, karena warga dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan. Faktor ketiga adalah dukungan LPM, yang tidak hanya hadir dalam forum formal tetapi juga melalui komunikasi informal dengan lurah. Faktor keempat adalah kepemimpinan lapangan lurah, yang tampak dari kesediaannya turun langsung mengawasi pembangunan dan membina masyarakat. Keberadaan 3 RW, 10 RT, dan 7 anggota LPM juga menjadi modal kelembagaan lokal yang mendukung pelaksanaan program.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara terletak pada kualitas relasi antara lurah, aparat, LPM, dan warga. Temuan ini sejalan dengan Punusingon et al. (2018) yang menegaskan bahwa optimalisasi kegiatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan lurah membangun kerja sama dengan unsur lokal. Rantepasang et al. (2017) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan bertumpu pada koordinasi, pembinaan, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Efektivitas peran lurah di Kelurahan Dara tidak hanya ditentukan oleh

otoritas formal, tetapi juga oleh kapasitas relasionalnya dalam membangun kepercayaan dan partisipasi.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa faktor penghambat jauh lebih kompleks. Hambatan pertama adalah struktur organisasi yang belum optimal, karena masih terdapat posisi atau fungsi yang belum terisi secara memadai. Hambatan kedua adalah kekurangan personel, sebab kelurahan hanya memiliki 7 aparat untuk melayani 1.955 jiwa. Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas SDM aparatur dan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Hambatan keempat adalah keterbatasan sarana-prasarana kerja, seperti komputer yang rusak, hanya tersedia 1 komputer, dan belum adanya *filling cabinet*. Hambatan kelima berasal dari kondisi sosial masyarakat, khususnya tingkat pendidikan yang rendah, ditandai warga berpendidikan sarjana hanya 66 orang.

Faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat dijalankan dalam kapasitas organisasi yang belum ideal. Temuan ini menguatkan pandangan Lampasa dan Ahmad (2024) bahwa kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi dan kapasitas aparatur. Di Kelurahan Dara, keterbatasan sarana dan personel membuat efektivitas peran lurah sangat bergantung pada kemampuan personalnya, bukan pada kekuatan sistem organisasi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memperlihatkan bahwa tantangan pemberdayaan tidak hanya berasal dari birokrasi, tetapi juga dari kapasitas sosial warga. Temuan ini relevan dengan Yuniar et al. (2024) yang menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai dasar penguatan ekonomi keluarga dan ketahanan sosial masyarakat.

Hasil dan diskusi penelitian ini memperlihatkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dara telah berjalan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa lurah bukan hanya pemimpin administratif, melainkan aktor manajerial lokal yang bekerja di persimpangan antara tuntutan birokrasi, pembangunan partisipatif, dan realitas sosial warga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak cukup ditopang oleh kepemimpinan lurah semata, tetapi memerlukan penguatan kapasitas aparatur, sarana-prasarana, dan kualitas partisipasi masyarakat secara lebih sistematis.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lurah Kelurahan Dara dalam pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, lurah telah membangun pola yang relatif partisipatif melalui koordinasi dengan aparat kelurahan, pelibatan masyarakat, dan komunikasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pada tahap pelaksanaan, lurah menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi program, dukungan terhadap pembangunan partisipatif, serta upaya pembinaan perekonomian masyarakat. Pada tahap pengawasan, lurah tidak hanya mengawasi tertib administrasi pemerintahan, tetapi juga memantau pembangunan fisik dan aktivitas ekonomi masyarakat agar tetap sesuai dengan tujuan pembangunan kelurahan.

Efektivitas peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan personel aparatur, sarana-prasarana kerja yang belum memadai, lemahnya dukungan administratif, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan tidak cukup ditentukan oleh kepemimpinan lurah semata, tetapi juga oleh dukungan organisasi, kualitas sumber daya aparatur, dan kapasitas sosial warga.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai lensa untuk memahami praktik kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kelurahan, peningkatan kapasitas aparatur, dan perluasan partisipasi warga sebagai prasyarat pemberdayaan yang lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak peran lurah terhadap perubahan kapasitas masyarakat secara lebih terukur, misalnya melalui indikator partisipasi, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryono, R. (2022). *Peran lurah dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak* (Doctoral dissertation, Universitas Tanjungpura).
- Bungin, B. (2010). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Faradilla, F. (2020). Peran lurah dalam koordinasi administrasi di Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda Kota. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gedeona, H. T. (2019). Telaah peran lurah dan camat dalam program percepatan pembangunan kelurahan bermartabat (P2KB) di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.31113/jia.v8i1.269>
- Lampasa, Y., & Ahmad, R. G. (2024). Peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Lurah Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(4), 2003–2010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.563>
- Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). *Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pelenkahu, M. G., Gosal, R., & Sambiran, S. (2017). Peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat (Suatu studi di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Pratama, R., & Sujianto. (2016). Peran kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11690>
- Punusingon, D. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Peran lurah dalam mengoptimalisasikan kegiatan PKK di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Putri, G. Y., Manalu, L., Hutagaol, M., Rezki, P., Nabila, R., Rindiani, R., & Syamsir. (2025). Peran kepemimpinan lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15066–15071. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27858>
- Qadar, H., Subhilhar, & Suriadi, A. (2021). Peran lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8(1). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.29>
- Rachman, I. M. (2019). Peran kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat pada Kantor Kelurahan Sungai Keledang Kota Samarinda. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*.
- Rantepasang, A., Kaawoan, J. E., & Rengkung, F. R. D. (2017). Peran lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik: Suatu studi di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Tarigan, A. P., & Erman, M. (2019). Peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/25933>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuniar, D. M., Sumodiningrat, G., & Armawy, A. (2024). Peran lurah dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga: Studi pada Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. *Jurnal Elektrosista*, 12(1), 49–57. <https://doi.org/10.63824/jtep.v12i1.253>